

Komunikasi Partisipatoris Kemitraan Polisi Masyarakat dalam Mengantisipasi Paham Radikal “ISIS” di Surabaya

Muhammad Fadeli

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya

Email :cak_deli@yahoo.co.id

Naskah diterima : 10-10-2016 | Revisi :20-10-2016 | Disetujui : 28-10-2016

Abstrak

Fenomena paham radikal “ISIS” Islamic State of Iraq and Syria mengancam keutuhan bangsa. Pemerintah secara tegas melarang segala bentuk aktifitas dan ajaran ISIS. Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam hal keamanan dan keteriban telah melakukan langkah-langkah preventif terhadap penyebaran paham radikal ISIS. Untuk membendung ajaran radikal tersebut diperlukan keterlibatan masyarakat sebagai mitra Polri. Peran serta masyarakat dalam menjaga kamtibmas adalah hal yang penting, disinilah dibutuhkan upaya Polisi merangkul masyarakat dalam mewujudkan *community Policing*. Komunikasi partisipatoris adalah bentuk komunikasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk kemitraan dengan Polisi. Partisipasi aktif masyarakat bersama Polri secara efektif dapat meminimalisir segala bentuk ancaman keamanan di tengah masyarakat. Pada hakikatnya tujuan Perpolisian masyarakat dalam bentuk forum kemitraan polisi masyarakat atau disingkat Polmas adalah terwujudnya kemitraan antara Polisi dan masyarakat lokal untuk mencegah maupun mencari jalan keluar atas masalah kamtibmas. Sehingga penanganan masalah tidak perlu melalui proses hukum formal. Kekuatan program perpolisian masyarakat atau Polmas *Community Policing* ini terletak bagaimana Polri mampu merangkul masyarakat dengan melakukan sosialisasi, komunikasi atau disebut kampanye persuasif kepada masyarakat sebagai mitra kerja. Metodologi penelitian ini adalah penggunaan komunikasi partisipatoris oleh warga masyarakat dalam menaggulangi paham radikal ISIS. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi warga dalam berkomunikasi, memberi informasi tentang penanggulangan penyebaran paham radikal ISIS di Surabaya.

Kata Kunci : radikal, kemitraan, komunikasi partisipatoris

Abstract

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), radicalism concept phenomenon is considered as threat for nation unity. Governmet clearly prohibits all kinds of activity and doctrins proposed by ISIS. Police department wich has the resposibilty to keep people safe has done preventive steps towards the spread of ISIS. To halt radicalism, people active involvement is very important to support police department. People's involvement in keeping the safe is needed to make community policing among people in which participatory communication as basic of the program in this police-citizen partnership. People involvement can minimize any instability possibly happens in the country. Principally, the purpose of Polmas is in the form of partnership between people and police to prevent or solve problems deal with instability so law problems do not have to be done in a court. The trength of community policing is in the power of the police to engage all people in socializing, communicating which are called as persuasive campaign to people as partner. Research method which is used is participatory communication by people to solve radicalism. This is done to elicit how far people participated in communicating and informing in preventing and solving the spread of radicalism concept and activities.

Key Words: radicalism, partnership, participatory communication

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Kemananan secara resmi menetapkan ideologi kelompok radikal yang menamakan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai paham terlarang di Indonesia. (berita satu.com, 25/3, 2015) Bahkan Kepala Biro Penmas Divhumas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, pemerintah sudah memutuskan tidak memberikan izin kepada ISIS untuk melakukan aktivitas di Indonesia. "Dikarenakan paham ISIS bertentangan dengan falsafah negara kita dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia," Rabu (6/8). (Republika.com)

Sementara Wakil Ketua Asosiasi Pondok Pesantren NU Indonesia KH Ahmad Fahrurrozi menyatakan umat Islam di lingkungan pesantren telah diajarkan paham Islam yang cinta damai dan penuh dengan toleransi. Paham tersebut secara otomatis menyisihkan ajaran Islam yang penuh dengan kekerasan dan kebrutalan. (Viva.co.id) "ISIS tidak akan hidup di dalam lingkungan pesantren. Ideologinya yang penuh dengan kekerasan tidak cocok dengan kultur pondok pesantren yang cinta damai dan penuh toleransi.

Dalam satu sesi wawancara di Radio Suara Surabaya (SS FM) acara *Jazz Traffic* Senin, 24-3-2015 Kapolda Jatim mengatakan bahwa Polri lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan. Strateginya adalah dengan melalui Kemitraan antara Polisi dan masyarakat atau yang sering disebut Polmas.

Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta dinamika masyarakatnya sangat terbuka terhadap pengaruh-pengaruh asing. Termasuk pengaruh ajaran radikal "ISIS" . tumbuh suburnya organisasi yang mengatasnamakan Agama memiliki sudut pandang berbeda dengan syariat yang ada berpeluang masuknya ajaran baru. Pemahaman yang keliru tentang "jihad" cenderung radikal, seperti yang dipertontonkan oleh ISIS di media massa.

Ajaran radikal yang menggejala di Indonesia sangat bertentangan dengan idiology Pancasila dan Islam pun mengajarkan cinta damai. Kecenderungan ajaran ISIS yang menghalalkan "darah" orang lain yang tidak sepaham akan mengancam tertib sosial di

Indonesia. Polri sebagai pelindung pengayom keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas baru dalam membendung paham radikal tersebut. Akan tetapi tanpa peran serta masyarakat upaya Polri akan sia-sia. Kemitraan Polisi dan masyarakat merupakan senergi yang kuat dalam membendung paham dan aksi radikal.

Sebenarnya konsep *Community Policing* yang sedang disosialisasikan Polri bukan barang baru di mata masyarakat, karena sejak dulu secara tradisional masyarakat telah melakukan pengamanan di lingkungannya masing-masing dalam bentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) ada juga Sistem keamanan swakarsa, maupun Babinkamtibmas di Desa-desa. Hanya masalahnya adalah di era reformasi, era civil society ini terjadi penurunan peran masyarakat dikarenakan ketidakpercayaan terhadap aparat hukum ditingkat lokal.

Dinamika masyarakat kian cepat sehingga mendorong Polri meningkatkan profesionalismenya. Dalam mengemban tugas yang sedemikian berat dengan rasio terbatas, maka Polri secara sitematis harus mampu menggandeng masyarakat. Secara struktural tugas pengayoman, perlindungan memang adalah bagian dari tugas Polri. Akan tetapi secara fungsional masyarakat berkewajiban menempatkan diri turut berpartisipasi bersinergi dengan tugas-tugas Polisi. Ketika mengimplementasikan tugas-tugasnya penting artinya Polri mendapat dukungan publik yaitu dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

SK Kapolri No.Pol : Skep/737/X/2005 tentang penerapan model perpolisian masyarakat dimaksudkan agar memberikan dasar hukum atau petunjuk untuk melakukan kemitraan dengan elemen masyarakat. Akan tetapi sejauh ini SK Kapolri tersebut secara umum belum menunjukkan hasil maksimal yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Walaupun nota bene Forum Kemitraan Polisi Masyarakat FKPM telah terbentuk di tingkat kecamatan maupun desa.

Komunikasi partisipatoris dalam program kemitraan Polisi Masyarakat adalah bentuk antisipasi, pencegahan paham-paham radikal masuk Indonesia. Kekuatan program perpolisian masyarakat atau Polmas *Community Policing* ini terletak bagaimana Polri mampu merangkul masyarakat. Dimana masyarakat

berpeluang memberikan informasi. Terdapat wadah komunikasi dengan pihak Polri. Pendekatan komunikasi partisipatoris adalah masyarakat sebagai subyek dalam menyelesaikan masalah-masalah di lingkungannya. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi kemitraan Polisi dan Masyarakat, peneliti akan mengkaji bagaimana Komunikasi Partisipatoris Kemitraan Polisi Masyarakat dalam mengantisipasi paham radikal “ISIS” di Surabaya.

Sebagai suatu strategi polmas berarti Forum Kemitraan Polisi Masyarakat menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam mengantisipasi menyebarnya ajaran radikal “ISIS” di Surabaya. Oleh karena itu substansi polmas dalam mewujudkan Kemitraan Polisi Masyarakat adalah kerjasama polisi dan masyarakat akan tetapi bukan sekedar kerjasama dalam oprasionalisasi penanggulangan bahaya keamanan yang di timbulkan oleh paham radikal terorisme tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan /pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaannya.

Dari sebuah konsep ideal tersebut di atas lalu muncullah problem dimasyarakat yang harus dicarikan jawabannya, dapat di terjemahkan dalam kalimat pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Komunikasi Partisipatoris Kemitraan Polisi Masyarakat dalam Mengantisipasi Paham Radikal “ISIS” di Surabaya
2. Apa saja kendala-kendala Komunikasi Partisipatoris Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Mengantisipasi Paham Radikal “ISIS” di Surabaya

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui Komunikasi Partisipatoris Kemitraan Polisi Masyarakat dalam mengantisipasi Paham Radikal “ISIS” di Surabaya
2. Mengetahui kendala-kendala Komunikasi Partisipatoris Kemitraan Polisi Masyarakat dalam mengantisipasi Paham Radikal “ISIS” di Surabaya

Target luaran pada penelitian ini adalah

1. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain, dan bisa menjadi salah satu bahan masukan kepada pihak institusi Polri dalam mengatasi

masuknya ajaran radikal “ISIS” di Surabaya.

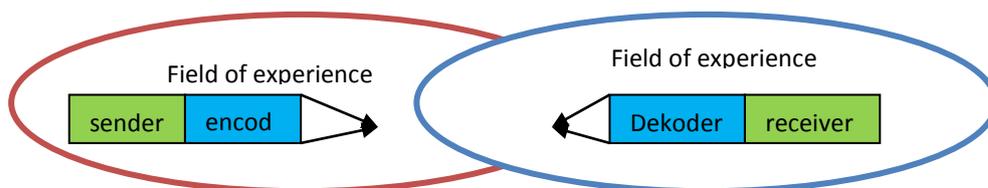
2. Hasil penelitian ini dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah Jurnal terakreditasi serta menjadi bahan seminar maupun diskusi.

Model Komunikasi

Proses Komunikasi adalah pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) pada orang lain (komunikan) Komunikasi akan berhasil apabila akan berhasil apabila pikiran disampaikan dengan menggunakan perasaan yang disadari dan akan gagal jika sewaktu penyampaian pikiran perasaan tidak terkontrol. Adapun yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana agar pikiran bersama perasaan yang akan disampaikan pada orang tersebut diberi istilah *picture in our head* pada komunikator dapat diterima dan dimenegrti oleh komunikan (effendy, 1984 :10) “komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (*frame of reference*) yakni paduan pengalaman dan pengertian (*collection of experiences and meaning*) yang pernah diperoleh komunikan” (Schram, 1971).

Menurut Scharm *Field of experince* merupakan faktor yang penting dalam komunikasi jika bidang pengalaman lancar. Sebaliknya bila pengalaman komunikan tidak sama dengan pengalaman komunikator maka akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain.

Model komunikasi sebagai penggambaran tentang suatu bagian atau sebuah realitas yang sengaja dibuat sederhana dalam bentuk gambar, grafik, verbal atau matematika (*little Jhon* 1983 :12). Model sebagai alat bantu dalam berfikir yang khususnya cocok untuk studi komunikasi karena dalam kenyataannya komunikasi merupakan sebuah kekuatan pengikat dalam hubungan antar manusia, sekaligus merupakan sesuatu yang jelas terlihat, dan tidak mempunyai bentuk yang tetap atau kelihatan. Tindak komunikasi mempunyai bentuk yang dapat diramalkan dan terjadi dalam struktur hubungan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut untuk menggambar garis yang menunjukkan kaitan yang ada dalam hubungan tersebut (Denis Mc.Quail :4) dalam suatu model komunikasi.



Gambar 1. Model Komunikasi

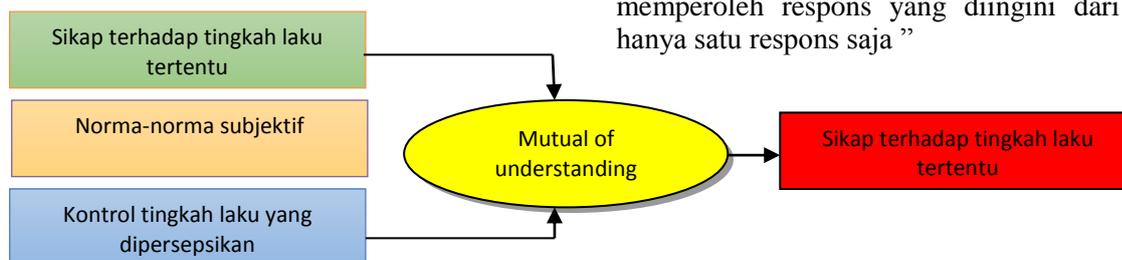
Komunikasi Partisipatoris

Inti integrasi komunikasi yang baik adalah komunikasi partisipatoris. Komunikasi partisipatoris adalah komunikasi yang mengasumsikan adanya proses humanis dengan menempatkan individu sebagai aktor aktif dalam merespon setiap stimulus yang muncul dalam lingkungan yang menjadi medan kehidupannya (Hamijoyo, 2005). Individu bukanlah wujud yang pasif yang hanya bergerak jika ada yang menggerakkan. Individu adalah wujud dinamis yang menjadi subyek dalam setiap perilaku yang diperkannya. Komunikasi partisipatoris dalam pembangunan merupakan instrumen untuk menghasilkan partisipasi masyarakat. Strategi komunikasi ini lebih menitikberatkan pada masyarakat untuk turut aktif dalam proses perencanaan program komunikasi yang tepat sejak awal. Aktifitas ditandai dengan adanya proses interaktif, komunikasi dua arah yang melihat bahwa semua orang sebagai sumber informasi yang pantas untuk didengarkan, yaitu pertukaran informasi, pengalaman, pengetahuan dan sudut pandang antara individu dan kelompok.

pemerintah menjadi mitra yang sejajar. 3) ketiga adalah tanggungjawab individu, keempat nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya. Kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan efektifitas komunikasi adalah pesan yang disampaikan : 1. Harus dirancang dan diampaikan dengan sebaik-baiknya dan menarik masyarakat. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. 3. Membangkitkan kebutuhan pribadi masyarakat dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 4. Memberikan solusi alternatif yang lebih baik untuk mendapatkan kebutuhan secara layak.

Pesan Persuasif

Didalam proses komunikasi pesan merupakan sekumpulan lambang komunikasi yang memiliki makna dan kegunaan dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan lain kepada manusia lain, untuk ini sangat vital dalam suatu komunikasi khususnya dalam komunikasi persuasi seperti yang dikatakan Robbin dan Jones (1986 :51) “ yang vital bagi komunikasi ialah menyusun pesan dan mengatur pesan sedemikian rupa sehingga kita memperoleh respons yang diinginkan dari pada hanya satu respons saja ”



Gambar 2. Model Mutual Of Understanding

Setidaknya ada empat dimensi dalam komunikasi partisipatoris (abdi dan syaril hadi) yakni :

- 1) prose rekayasa sosial melalui pembelajaran bagi individu dan masyarakat. Pembelajaran ini akhirnya meningkatkan kapasitas seluruh stkaholder dalam upaya memobilisasi sumber daya yang dimiliki.
- 2) dimensi kedua partnership dalam tigtak ini masyarakat dan

Jika pesan akan dapat menghasilkan respon tertentu kalau dirancang dengan baik sehingga harus mengoptimalkan lambang komunikasi yang tersedia dan disesuaikan dengan topik yang akan dikomunikasikan, saluran komunikasi yang digunakan serta khalayak yang setuju. Keperuasifan suatu pesan sebenarnya tidak hanya sebatas menstimulasi emosi khalayak sasaran. Tetapi dapat pula dikatakan persuasif apabila menyentuh rasio (akal) khalayak

sasaran. Jadi pesan persuasif sebagaimana yang dikemukakan Little John (1996:7).

Dipandang sebagai usaha sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif-motif kearah tujuan yang telah ditetapkan. Maka memanipulasi disini dalam arti memanfaatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan motif khalayak sasaran sehingga tergerak untuk mengikuti maksud pesan yang disampaikan kepadanya”

Konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas)

Sebelum konsep *community policing* dimunculkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip melayani dan melindungi (*to serve and to protect*) ditekankan.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah.

Kondisi sebagaimana diutarakan diatas mendorong diluncurkan program baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian terutama yang disebut *community policing* pada hakekatnya bukan merupakan hal asing. Kebijakan siskamswakarsa diangkat dari nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia.

Seperti yang termaktub dalam surat keputusan Kapolri No.Pol : Skep/737/X/2005 pengertian Konsep polmas adalah Polmas mengandung 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “policing” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut oprasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis

bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakangi. Model Polmas meliputi :

1. Model wilayah yaitu yang mencakup satu atau gabungan beberapa area/kawasan pemukiman (RW/RK/dusun/desa/kelurahan) pembentukan polmas model ini harus lebih didasarkan pada keinginan masyarakat itu sendiri, walaupun proses ini bisa saja dilatarbelakangi oleh dorongan polisi.
2. Model kawasan yaitu satu kesatuan area kegiatan bisnis dengan pembatasan yang jelas (mall/pusat perdagangan/pertokoan/perkantoran/kawasan industri) pembentukan polmas model ini dapat dilakukan atas inisiatif bersama.

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat FKPM

Polri dengan masyarakat mempunyai peran yang berbeda. Namun, Kemitraan menyadarkan kedua belah pihak sebagai mitra yang sejajar dalam memberantas kejahatan. Kekuatan dan kemitraan akan menentukan kesuksesan tugas yang akan dicapai. Hal ini bukan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dari atas tetapi merupakan pendekatan dari bawah yang dimulai dari pribadi masing-masing.

Dengan terjalannya Kemitraan antara Polri dengan masyarakat maka akan timbul rasa saling membutuhkan dan rasa saling menghargai, sehingga setiap tugas yang diemban oleh anggota Polri tidak akan menemui hambatan dan kesuksesan dalam setiap pelaksanaan tugas akan selalu dicapai, masyarakat akan dengan sukarela menerima tanggung jawab bersama-sama Polri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Kepolisian berbasis masyarakat atau Polmas bersandar pada kepercayaan bahwa hanya dengan bekerja bersamalah, masyarakat dan polisi akan mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Polisi diharapkan tidak sekedar berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai penasihat, fasilitator, dan pendukung gagasan baru, dengan basis masyarakat, serta disupervisi oleh polisi.

Polmas, pada hakikatnya, adalah kemitraan antara polisi dan warga setempat untuk mengidentifikasi dan menangani berbagai masalah, khususnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dihadapi oleh warga. Dalam Polmas, masalah kamtibmas bukan semata-mata menjadi monopoli tugas

polisi, seluruh warga masyarakat berperan serta sebagai mitra yang sejajar dengan polisi dalam upaya-upaya memelihara kamtibmas. Di Surabaya, FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) merupakan perwujudan dari Polmas sebagai bentuk keikutsertaan berbagai elemen masyarakat dalam mengatasi masalah keamanan (jurnal UNAIR 2013)

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, untuk mendapatkan data lebih konkrit melakukan wawancara dengan anggota Kepolisian di tingkat Polsek yaitu Polsek Genteng, Polsek Gubeng, Polsek Sawahan, Polsek Wonocolo, Polsek Wonokromo, Polsek Jambangan dan Polsek Tenggiling Mejoyo. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan model Two-Way Asymmetric, model komunikasi ini berperan untuk mengumpulkan informasi tentang publik untuk pengambilan keputusan manajemen. Walaupun umpan balik dari publik diperhatikan, namun pesan-pesan komunikasi organisasi lebih banyak berusaha agar publik beradaptasi dengan organisasi bukan sebaliknya (Rahmat 2007:294). Dalam hal ini peneliti menggunakan metode :

1. Wawancara Mendalam
2. Focus Group Discussion (FGD)

Analisa data menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dari satuan uraian dasar.

1. Setelah data dirasa cukup maka dilakukan analisis dengan membuat kategori-kategori tertentu atau domain-domain tertentu. Menurut Wimmer & Dominick (2000) disebut “*Filling system*”, setelah itu data diinterpretasi dengan berpedoman pada daftar pertanyaan lalu memadukan konsep-konsep atau teori-teori tertentu
2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dimana peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tanpa mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau melakukan prediksi (Rahmat, 2000:24).

Desain Penelitian



Gambar 4. Desain Penelitian

ANALISA DAN HASIL

Pola Komunikasi Polisi Masyarakat

Untuk mendapatkan data tentang bagaimana komunikasi partisipatoris kemitraan Polisi Masyarakat dalam membendung paham radikal ISIS peneliti telah melakukan wawancara dengan anggota Kepolisian di tingkat Polsek yaitu Polsek Gayungan, Polsek Wonocolo, Polsek Wonokromo, Polsek Jambangan, Polsek Gubeng, Polsek Sawahan, Polsek Tenggiling. Sesuai rumusan masalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap program Kepolisian serta bagaimana pendekatan Kepolisian di tingkat sektor/kecamatan dalam menanggulangi penyebaran paham radikal. Polsek sebagai ujung tombak Polisi dalam melindungi mengayomi masyarakat bertugas mendeteksi bagaimana gangguan Kamtibmas di tingkat paling bawah. Sesuai tugas dan fungsi bagian Intelkam berperan mendeteksi di lapangan tentang gangguan ancaman Kamtibmas sedangkan untuk melakukan pendekatan di masyarakat bagian Binmas atau lebih operasional bagian Binkamtibmas.

Adanya isu-isu penyebaran paham radikal di Indonesia khususnya di Surabaya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Ideologi radikal ISIS adalah salah

satu aliran yang patut diwaspadai Kepolisian maupun masyarakat. Karena aliran ISIS mengajarkan paham kekerasan, menghasut bersifat destruktif. Untuk menanggulangnya Polisi tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu perlunya upaya kerjasama sinergitas atau kemitraan antara Polisi dan masyarakat. dalam konteks komunikasi partisipatoris, antara Polisi dan Masyarakat saling bersinergi untuk menanggulangi paham radikal ISIS yang berkembang. Bentuk komunikasi antara Kepolisian dan masyarakat berlangsung secara aktif dan humanis. Berikut hasil wawancaranya.

Pelaksanaan kemitraan di Polsek Genteng dalam menangkal paham radikal pihak kepolisian telah bekerjasama dengan semua element masyarakat dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan dengan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai bahaya radikalisme khususnya oleh fungsi Binmas di tingkat RT di kelurahan wilayah Kecamatan Genteng. Sedangkan keterlibatan masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menangkal paham radikal adalah membantu pihak kepolisian dalam memberantas paham radikalisme. Mereka selalu memberikan informasi sekecil apapun terkait isu isu dan paham radikalisme, karena sebagian besar masyarakat wilayah Polsek Genteng tidak setuju dengan adanya paham radikalisme.

Sedangkan pelaksanaan kemitraan yang dibangun oleh Polsek Gubeng adalah pertama pengumpulan keterangan/intelijen mengenai aksi radikalisme adalah hal terpenting dalam memerangi radikalisme Siapa dalangnya, kapan, dimana dan bagaimana ia akan melancarkan aksinya adalah pertanyaan yang harus terjawab dalam pengumpulan intelijen. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah. Kedua adalah melakukan Pengamanan Operasi Pengamanan operasi atau kegiatan merupakan hal penting dalam pencegahan terjadinya aksi anarki yang terjadi. Dalam pelaksanaan aksinya radikalisme ini akan mengeksploitasi data intelijen dari sasaran. Hal ini dapat di cegah dengan kegiatan lawan intelijen serta dengan meningkatkan kesiap-siagaan terutama aparat keamanan. Ketiga Pembentukan Manajemen Krisis. Tindakan yang paling awal adalah insiden yang terjadi harus dipastikan. Langkah selanjutnya adalah rencana operasi harus segera dibentuk untuk menghadapi aksir radikalisme

kiri tersebut. Tidak gegabah dalam bertindak dan menyiapkan segala bentuk upaya perusasi dan negoisasi terhadap aksi yang sedang berlangsung. Dan keempat Pendekatan kepada masyarakat dan penyebaran informasi tentang waspada aksi radikalisme Melakukan penyuluhan ke dalam daerah-daerah pembelajaran khususnya di usia sekolah dan universitas yang menjadi target utama para anggota aksi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyadarkan betapa pentingnya sikap waspada dan keterbukaan terhadap hal apapun kepada keluarga dan orang tua. Menyampaikan kepada kyai dan para pemuka agama untuk ikut bekerja sama untuk mendukung pengamanan masyarakat dalam bidang agama dan moral.

Untuk pelaksanaan pengembangan komunikasi partisipatoris di Polsek Sawahan adalah beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan terorisme di kalangan pemuda. *Pertama*, memperkuat pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar- umat beragama, kebebasan yang bertanggungjawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar warga masyarakat. *Kedua*, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi pemuda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya sehingga dapat mengantisipasi pemuda dari pengaruh ideologi radikal terorisme. *Ketiga*, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikal. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan. *Keempat*, memberikan keteladanan kepada pemuda. Sebab, tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta

tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi *role model* yang bisa diikuti dan diteladani oleh para pemuda.

Berbeda dengan Polsek Wonocolo yaitu dengan cara berpatroli di wilayah-wilayah tempat tinggal mereka, ruang lingkup gerak kelompok-kelompok yang dianggap radikal juga harus diawasi ketat. Tujuan mereka cenderung bersikap meneror dan target mereka biasanya polisi, dan mahasiswa. Tempat yang mereka sering kunjungi biasanya tempat hiburan dan tempat umum yang berbau Amerika, misal restoran cepat saji, tempat penginapan. Faham radikal ini seharusnya diwaspadai oleh masyarakat khususnya mahasiswa, jangan sampai terpengaruh untuk gabung menjadi salah satu anggota, dengan mencari banyak anggota mereka akan memperkuat kelompoknya. Dan kita sebagai mahasiswa seharusnya menghindari kelompok tersebut. Upaya Polsek Wonocolo melakukan pendekatan kepada mahasiswa adalah memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Juga mengarahkan para mahasiswa pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya maupun olahraga. Serta memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Pendekatan lain adalah menyuburkan tradisi wirausaha, agar dapat menjadi alternatif gerakan perekonomian. Sehingga membantu percepatan mengatasi masalah ekonomi dan kesenjangan sosial artinya cara ini merupakan salah satu pencegahan adanya pemuda ikut dalam jaringan terorisme. Munculnya aktivitas mahasiswa berbasis wirausaha berpotensi membantu mengurangi angka pengangguran kaum intelektual dan pemikiran mahasiswa karena kurangnya pekerjaan sehingga dapat melarikan dia atau masuk dalam jaringan teroris. Sehingga tidak hanya dilahirkan mahasiswa pengangguran, melainkan mahasiswa yang betul menjadi mahasiswa intelektual dan khususnya dapat memerangi masalah terorisme. tugas Polsek hanya menunjukkan bagaimana mahasiswa memahami kembali hakikat dirinya.

Polsek Wonokromo berada di kawasan rawan kriminal karena dekat dengan kawasan pasar dan stasiun oleh karena itu untuk menekan terjadinya tindak kejahatan dan masuknya paham radikal yaitu dengan cara berpatroli di wilayah-wilayah tempat tinggal yang diindikasikan jaringan radikal. Ruang lingkup gerak mereka juga harus diawasi ketat. Tujuan mereka cenderung bersikap meneror dan target mereka biasanya polisi, dan mahasiswa. Tempat yang mereka sering kunjungi biasanya tempat hiburan dan tempat umum yang berbau Amerika, misal restoran cepat saji, tempat penginapan. Faham radikal ini seharusnya diwaspadai oleh masyarakat khususnya mahasiswa, jangan sampai terpengaruh untuk gabung menjadi salah satu anggota, dengan mencari banyak anggota mereka akan memperkuat kelompoknya. Apa peran masyarakat dalam membantu kepolisian untuk menangani paham radikal ?. Peran masyarakat sangat membantu pihak kepolisian dalam memberantas paham radikalisme. Mereka selalu memberikan informasi sekecil apapun terkait isu-isu dan paham radikalisme.

Implementasi pencegahan paham radikal di wilayah hukum Polsek Jambangan yaitu dengan cara pencegahan terhadap paham radikal melalui deteksi dini terhadap gejala-gejala timbul pada radikalisme, sering melakukan koordinasi dengan presiden BEM, tokoh agama masyarakat, termasuk dikampus. Melakukan introgasi bila menjumpai/spanduk berkaitan dengan radikalisme, sejauh ini diduga terlibat dari kelompok tersebut. Melakukan pemantauan bekerja sama tiga pilar : TNI, Kecamatan, Polsek. Peranan Masyarakat Mencegah Paham Radikalisme :

1. Proaktif membangun komunikasi, interaksi dan hubungan
2. Pemberdayaan kaum muda kedalam aktivitas positif, bersifat produktif dan membangun
3. Mendayagunakan organisasi-organisasi sosial
4. Melakukan *Mapping* terhadap individu atau kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku teroris. Contoh Konkrit : Keluarga, Lingkungan, Lembaga pendidikan, Tokoh masyarakat, agama

Berdasarkan hasil wawancara di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, memaparkan bahwa kelompok-kelompok radikalisme sendiri

tidak semata-mata tiba-tiba melakukan perekrutan secara langsung. Tetapi mereka menggunakan beberapa tahapan-tahapan agar orang-orang mau dan ikut menjadi anggota kelompok radikal seperti NII, Gavatar, ISIS secara perlahan tanpa mereka sadari. Jika kelompok-kelompok radikal tersebut mencari massa dan melakukan perekrutan secara transparansi, maka orang-orang tidak akan mau ikut masuk ke dalam kelompok tersebut. Oleh sebab itu kelompok-kelompok radikal ini menggunakan beberapa tahapan dalam mencari massa untuk dijadikan anggotanya. Tahapan-tahapan tersebut antara lain yaitu:

1. Melakukan beberapa kegiatan di lingkungan masyarakat yang tidak menyimpang untuk membangun citranya terlebih dahulu, misalnya kegiatan gotong royong pemberangkatan umroh secara gratis.
2. Setelah mereka mendapatkan citra yang baik di lingkungan masyarakat, barulah mereka melakukan perekrutan dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan yang tidak resmi, disitulah biasanya mereka mendoktrin seseorang. Bahkan perekrutan-perekrutan ini sudah terstruktur. Mulai dari atasan hingga bawahan yang saling terkoneksi dengan yang lainnya.

Lalu bagaimana peran aparat kepolisian untuk menangani masalah ini?. Polisi sendiri terdiri dari polisi bersegarang dan tidak berseragam. Polisi yang bertugas menyelidiki dan mengumpulkan data-data di lapangan mengenai kasus-kasus radikalisme adalah polisi yang tidak menggunakan seragam (intel). Intelpun juga tidak bisa bertindak sesuai dengan kehendaknya, melainkan mereka harus koordinasi dengan berbagai pihak yakni polisi yang memakai seragam, lurah, camat, Ormas, MUI, tokoh masyarakat seperti RT/RW untuk mendapatkan dukungan. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat itu termasuk ke dalam gerakan radikal, ISIS, terorisme, atau Islam garis keras, yakni dari latar belakangnya. Di lapangan memang tidak semudah membaca buku, begitu juga dengan agama/aliran. Polisi tidak dapat menentukan/mengetahui secara langsung. Perlu adanya laporan dari masyarakat, atau mungkin polisi melihat sendiri adanya perbedaan/keganjalan pada kegiatan tersebut. Cara mendeteksi dan membedakannya tentu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak jika

ingin mendeteksi aliran ini. Tidak semata-mata polisi bertugas sendiri.

Mengapa perlu adanya dukungan orang lain?. Karena apa yang kita persepsikan belum tentu sama dengan persepsi orang lain sehingga perlu adanya dukungan orang lain untuk mendeteksi itu termasuk aliran radikal atau bukan. Intel perlu memonitoringnya terlebih dahulu. Setiap daerah diberi dua petugas dari kepolisian yakni polisi yang berseragam dan tidak berseragam untuk memonitoring setiap kegiatan yang di adakan di lingkungan masyarakat.

Dalam proses memonitoring intel menggunakan beberapa cara, antara lain:

1. Melakukan pendataan. Yaitu mendata identitas orang-orang yang mengadakan kegiatan-kegiatan di lingkungan tersebut.
2. Mencari tahu kegiatan yang dilakukan. Mencari tahu apa tujuan diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut.
3. Mencari tahu latar belakang/keyakinan/misi munculnya aliran radikalisme tersebut. Karena banyak aliran radikalisme yang memiliki latar belakang dan visi misi yang sama tetapi nama-namanya berbeda.
4. Mencari tahu apakah kegiatan itu menyimpang atau tidak. Jika tidak, maka polisi tidak berwenang untuk mengamankan. Tetapi jika kegiatan tersebut menyimpang, maka polisi boleh mengamankan dengan tetap menjaga haknya. Karena meskipun seseorang itu bersalah, dia tetap memiliki hak yang sudah diatur di dalam undang-undang.

Empat tahap tersebutlah yang dijadikan patokan aparat kepolisian (untuk) menyelidiki suatu kasus. Jika sudah tercium adanya gerakan-gerakan mencurigakan yang menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat barulah intel meminta tugas dari polisi yang memakai seragam untuk mengamankan orang-orang tersebut.

Untuk mencegah adanya perekrutan kelompok gerakan radikal ini, tentunya tidak hanya melibatkan pihak kepolisian saja. Melainkan juga masyarakat, baik itu dari kaum muda maupun tua. Setiap individu perlu mewaspadaai setiap kegiatan yang sekiranya tidak masuk akal. Seperti umroh gratis yang dibiayai perorangan. Jika ada kegiatan semacam ini, patut untuk dicurigai dan diwaspadai bukan untuk dihalangi.

Oleh sebab itu, perlu adanya berbagai macam even penyuluhan, serta perlu juga adanya kerjasama antara pihak kepolisian, ormas, tokoh masyarakat (RT/RW), camat, lurah MUI, instansi pemerintahan, dan instansi pendidikan untuk memberikan penyuluhan dalam mewaspadai gerakan-gerakan radikalisme ini. Dan tentunya perlu adanya koordinasi satu sama lain yang saling mendukung. Karena yang berwenang tidak hanya polisi saja tetapi juga dari berbagai pihak termasuk masyarakat sendiri.

Kendala Komunikasi Partisipatoris Kemitraan Polisi Masyarakat

Inti komunikasi adalah adanya kesamaan makna antara komunikator dengan komunikan. Akan tetapi setiap komunikasi pasti mengalami kendala-kendala karena setiap individu memiliki persepsi yang berbeda. Untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal ISIS di Surabaya satuan Kepolisian di tingkat Sektor melakukan kerjasama dengan masyarakat. kerjasama tersebut dalam bentuk kemitraan antara Polisi dan Masyarakat *Community Policing*. Untuk membangun kemitraan antara Polisi melakukan pendekatan komunikasi partisipatoris. Di mana masyarakat dapat terlibat langsung dalam penyelesaian masalah dilingkungannya. Akan tetapi pada praktiknya mengalami beberapa kendala kultural dilapangan. Dimana Polisi dalam penerapan *Community Policing* cenderung bersifat struktural terbentuk lembaga bernama Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) ditingkat Polsek. Secara kultural belum dijiwai semangat melayani dan melindungi sebagai suatu kewajiban profesi. Sedangkan kendala di masyarakat adalah adanya apriori kecurigaan terhadap tugas-tugas Polisi. Citra negatif dari oknum Polisi masih menghantui sebagian masyarakat sehingga mengambil sikap pasif terhadap upaya kemitraan yang di bangun Polisi.

Paham radikal menjadi penghambat kemitraan Polisi Masyarakat, karena radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan pergantian terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya, jika perlu dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Atau menginginkan adanya perubahan total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Sehingga jika masyarakat terpengaruh paham radikal

maka banyak menghalalkan segala cara dan selalu bersifat tertutup dan inklusif.

Membangun kemitraan melalui komunikasi partisipatoris

Terjalannya kemitraan antara Polisi dan masyarakat bisa terwujud jika terdapat saling pengertian. Pengertian dapat dibangun melalui komunikasi yang humanis dimana antara komunikator (Polisi) dan Komunikan (Masyarakat) terlibat secara aktif dalam proses komunikasi. Masalahnya adalah bagaimana Polisi melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap problem di masyarakat. Cara Kepolisian untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyebaran paham radikal di masyarakat melakukan pendekatan sebagai berikut :

1. Preventif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah
2. Represif, yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi tersebut dapat dihentikan
3. Persuasif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan. Misalnya melalui cara mengajar, membimbing atau menasehati masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.

Pesan-pesan persuasif adalah merupakan bagian dari strategi komunikasi partisipatoris. Pesan-pesan persuasif yang dilakukan Kepolisian sebagai upaya mengubah pikiran yang negatif dengan memanipulasi motif-motif ke arah tujuan yang dikehendaki Kepolisian. Jika Polisi sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan secara aktif menjalis interaksi maka yang diharapkan adalah adanya kesamaan makna.

Dengan rasio terbatas maka Polri secara sistematis harus mampu menggandeng masyarakat. Secara struktural tugas pengayoman, perlindungan memang adalah bagian dari tugas Polri. Akan tetapi secara fungsional masyarakat berkewajiban menempatkan diri turut berpartisipasi bersinergi dengan tugas-tugas Polisi. Ketika mengimplementasikan tugas-tugasnya penting artinya Polri mendapat dukungan publik yaitu dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

Pada hakikatnya kemitraan Polisi dan masyarakat bertujuan tujuan terwujudnya untuk

mencegah maupun mencari jalan keluar atas pemecahannya sehingga penanganan masalah tidak perlu melalui proses hukum formal. Apabila cita-cita ini terwujud maka dampaknya sangat positif bagi Polri akan meringankan beban tugas dan masyarakat sendiri akan merasa memiliki kewajiban menjaga ketentraman bersama.

KESIMPULAN

Dari analisis penelitian dengan judul "Pola Komunikasi Partisipatoris antara Polisi dan Masyarakat dalam mengantisipasi paham radikal ISIS adalah untuk mengungkap substansi kemitraan yang dibangun oleh Polri. Rasio anggota Polri dengan masyarakat yang tidak seimbang adalah dasar untuk melibatkan masyarakat dalam menangani Kamtibmas. Perlu diperhatikan dalam pencegahan dan menanggulangi radikalisme adalah mawas diri, agar tidak akan terpengaruh dan membuat paham radikal semakin meluas. Penanggulangan radikalisme perlu dilakukan dengan lebih fokus, terarah serta terkoordinasi dengan melibatkan unsur-unsur penting pemuka agama. Pencegahan radikalisme akan lebih efektif dilakukan melalui cara pendekatan kultural dan persuasif daripada menggunakan kekuasaan. Alat negara (Polisi) maupun masyarakat harus bahu-membahu dalam pencegahan, pengurangan, dan pemusnahan radikalisme guna membangun bangsa menjaga persatuan serta perdamaian. Dengan pendekatan komunikasi partisipatoris Polisi membangun kemitraan dengan masyarakat dalam membendung paham Radikal ISIS masuk di Surabaya. Efektifitas komunikasi partisipatoris sangat tergantung pada kesetaraan dalam penyelesaian masalah. Akan tetapi upaya komunikasi partisipatoris melalui kegiatan perpolisian masyarakat mengalami berbagai macam kendala. Kendala struktural hanya terbentuk Forum kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) ditingkat Kecamatan maupun kawasan akan tetapi fungsinya belum maksimal. Sedangkan secara kultural Polisi belum dijiwai semangat melayani dan melindungi sebagai suatu kewajiban profesi. Adanya ketidakpercayaan Polisi kepada masyarakat dan sikap apriori masyarakat terhadap Polisi membuat komunikasi partisipatoris Perpolisian Masyarakat tidak berjalan efektif.

SARAN

1. Perlu dilakukan revitalisasi kebijakan Polri tentang Kemitraan Polisi Masyarakat atau Polmas melalui aktualisasi kegiatan maupun reorganisasi Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat.
2. Pendekatan komunikasi partisipatoris terbukti lebih efektif dalam penanggulangan paham radikal sehingga perlu di galakkan di tingkat Polsek.
3. Komunikasi persuasif agar menjadi langkah pertama Polisi dalam setiap penyelesaian konflik di masyarakat.
4. Memaksimalkan fungsi-fungsi Binamitra, Binkamtibmas dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat serta untuk mendeteksi dini paham radikal di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moi. (2006). "Menjadi Public relations yang handal"
- Bachtiar, Harsya. (1999). "Ilmu Kepolisian suatu cabang ilmu pengetahuan yang baru". Jakarta.
- Dedy, Djamaluddin Malik. Yosol, Iriantara. (1993). "Komunikasi Persuasif". PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dennis, Mc Quail. Sven, Windah. (1984). "Model Komunikasi". Logmar Londong.
- Hadi, Syarif Hadi. (2010). "Dimensi Komunikasi Partisipasi"
- Kriantono, Rahmat. (2006). Riset Komunikasi. Misner, Gordon. Criminal Justice Studies Theer Trans Disiplinary Nature.
- Neni, Yulianita. (2001). Komunikasi Pemasaran. Program Pasca Sarjana. Unitomo.
- Ruslan, Rusadi. (1999). Kampanye Public Relation. Rajawali Pers.
- Surat Keputusan kapolri No.Pol :Skep/737/X/2005
- Sutandyo, Wignyo Subroto. (2002). Polisi suatu civil Society
- S. Sutanto, Astrid. (1999). Opini Masyarakat.
- Tabah, Anton. (1996). Polisi Budaya Politik UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Digital Library UNS
Pustaka Ilmiah Unpad
Republika.com. 15 /3/2015)
Viva.co.id, 15/3/2015